

**MODEL JEJARING KEBIJAKAN DALAM PENATAAN  
RUANG TERBUKA HIJAU DI KOTA BANDUNG**

*GREEN OPEN SPACE POLICY NETWORK MODEL IN URBAN PLANNING IN  
BANDUNG CITY*

Oleh :

Nur Rafiq Setiawan

238010028

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Syarat dalam Mengikuti Sidang Tesis dalam Rangka Meraih  
Gelar Magister Pada Program Magister Administrasi dan Kebijakan Publik



**PRORAM MAGISTER ADMINISTRASI DAN KEBIJAKAN PUBLIK  
PASCASARJANA UNIVERSITAS PASUNDAN BANDUNG**

**2026**

## ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum optimalnya pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Bandung yang ditandai dengan rendahnya capaian luasan RTH serta adanya fragmentasi kebijakan antarinstansi dan lemahnya koordinasi lintas sektor. Penelitian ini menggunakan kerangka operasional jejaring kebijakan DeLeon dan Varda (2009) yang mencakup dimensi representation/diversity, reciprocity, horizontal power structure, embeddedness, trust, participation in decision making, dan collaborative leadership untuk menganalisis hubungan antar aktor dalam pengelolaan RTH.

Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode fenomenologi melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan Focus Group Discussion (FGD) dengan melibatkan aktor pemerintah, akademisi, komunitas, dan sektor swasta. Analisis dilakukan secara tematik untuk mengidentifikasi pola interaksi dan dinamika jejaring kebijakan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa jejaring kebijakan RTH masih didominasi oleh pemerintah dengan partisipasi aktor non-pemerintah yang belum optimal. Relasi antar aktor belum seimbang, ditandai dengan rendahnya kepercayaan, lemahnya timbal balik, serta proses pengambilan keputusan yang masih bersifat formalitas. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan jejaring kebijakan melalui integrasi lintas sektor, transparansi, kepemimpinan, dan peningkatan partisipasi menjadi kunci dalam mewujudkan tata kelola RTH yang efektif dan berkelanjutan.

***Kata kunci: Jejaring Kebijakan, Ruang Terbuka Hijau, Tata Kelola, Jejaring Kebijakan, Partisipasi***

## ABSTRACT

*This study is motivated by the suboptimal management of Green Open Space (GOS) in Bandung City, as indicated by the low achievement of GOS coverage, policy fragmentation across institutions, and weak cross-sector coordination. This research applies the policy network framework developed by DeLeon and Varda (2009), which includes the dimensions of representation/diversity, reciprocity, horizontal power structure, embeddedness, trust, participation in decision making, and collaborative leadership to analyze the relationships among actors in GOS management.*

*The method used is a qualitative approach with a phenomenological method, employing interviews, observations, documentation, and Focus Group Discussions (FGD) involving government, academics, communities, and private sector actors. Data were analyzed thematically to identify patterns of interaction and the dynamics of the policy network.*

*The results show that the GOS policy network is still dominated by government actors, while the participation of non-government actors remains suboptimal. Actor relations are not yet balanced, as indicated by low levels of trust, weak reciprocity, and decision-making processes that are still largely procedural. This study concludes that strengthening policy networks through cross-sector integration, transparency, collaborative leadership, and increased participation is essential to achieve effective and sustainable GOS governance.*

***Keywords: Policy Network, Green Open Space, Governance, Collaboration, Participation***

## RINGKESAN

Panalungtikan ieu dilatarbelakangi ku can optimalna pangelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Bandung, anu katingali tina can kahontalna luasan RTH, ayana fragmentasi kawijakan antar instansi, sarta kurangna koordinasi lintas sektor. Panalungtikan ieu ngagunakeun kerangka jejaring kawijakan ti DeLeon jeung Varda (2009) anu ngawengku dimensi representation/diversity, reciprocity, horizontal power structure, embeddedness, trust, participation in decision making, jeung collaborative leadership pikeun nganalisis hubungan antar aktor dina pangelolaan RTH.

Métode anu digunakeun nyaéta pendekatan kualitatif kalayan metode fenomenologi, ngaliwatan wawancara, observasi, dokumentasi, sarta Focus Group Discussion (FGD) kalayan ngalibetkeun aktor pamaréntah, akademisi, komunitas, jeung sektor swasta. Analisis data dilakukeun sacara tematik pikeun ngaidentifikasi pola interaksi jeung dinamika jejaring kawijakan.

Hasil panalungtikan nunjukkeun yén jejaring kawijakan RTH masih didominasi ku pamaréntah, sedengkeun partisipasi aktor non-pamaréntah can optimal. Hubungan antar aktor can saimbang, katingali tina rendahna kapercayaan, lemahnya timbal balik, sarta prosés nyieun kaputusan anu masih kénéh bersifat formalitas. Panalungtikan ieu nyindekkeun yén penguatan jejaring kawijakan ngaliwatan integrasi lintas sektor, transparansi, kapamingpinan , sarta paningkatan partisipasi mangrupa konci pikeun ngawujudkeun tata kelola RTH anu éféktif jeung berkelanjutan.

**Kecap konci: Jejaring Kawijakan, Ruang Terbuka Héjo, Tata Kelola, Jejaring Kebijakan, Partisipasi**

# 1. PENDAHULUAN

Kota Bandung sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi dan pendidikan di Indonesia menghadapi tantangan urbanisasi yang kompleks. Pertumbuhan penduduk yang pesat mendorong alih fungsi lahan dari kawasan pertanian, hutan kota, dan ruang terbuka menjadi kawasan terbangun seperti permukiman, perkantoran, dan pusat perdagangan. Kondisi ini berdampak signifikan terhadap ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di wilayah perkotaan.

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandung Tahun 2011–2031, kota ini menargetkan minimal 30% dari total luas wilayah sebagai RTH. Namun, hingga tahun 2024, total luas RTH di Kota Bandung baru mencapai sekitar 12,8% dari total luas wilayah kota. Kondisi ini jauh dari target yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Secara keseluruhan, total luas RTH Kota Bandung pada tahun 2020 tercatat sebesar 2.048,97 hektare, setara dengan 12,25% dari total luas wilayah kota.

Salah satu persoalan mendasar dalam pengelolaan RTH di Kota Bandung adalah fragmentasi kebijakan yang menyebabkan kurangnya keterpaduan dalam perencanaan dan pelaksanaan. Kebijakan terkait RTH tersebar di berbagai instansi, seperti Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan, dan Pertamanan (DPKP3), Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK), serta Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi, dan Tata Ruang (DICIPTABINTAR). Minimnya koordinasi lintas sektor sering menimbulkan inkonsistensi data, tumpang tindih kewenangan, serta lambatnya implementasi kebijakan RTH.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, pendekatan jejaring kebijakan (policy network) dipandang relevan sebagai kerangka analisis untuk memahami dan memperkuat tata kelola RTH yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan secara integratif. Penelitian ini mengajukan tiga rumusan masalah utama: (1) Bagaimana model jejaring kebijakan yang terbentuk antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam pengelolaan RTH di Kota Bandung? (2) Bagaimana pola hubungan, bentuk jejaring kebijakan, dan peran masing-masing aktor dalam proses perumusan hingga implementasi kebijakan RTH? (3) Apa hambatan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan RTH berdasarkan perspektif para aktor yang terlibat?

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis model jejaring kebijakan dalam pengelolaan RTH di Kota Bandung berdasarkan dimensi-dimensi kerangka DeLeon dan Varda (2009), mengidentifikasi pola hubungan antar aktor dan bentuk interaksi dalam jejaring kebijakan,

serta mengungkap hambatan-hambatan yang menghambat efektivitas implementasi kebijakan RTH. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan konsep jejaring kebijakan dalam konteks pengelolaan lingkungan perkotaan di negara berkembang.

## **2. TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI**

### **2.1 Konsep Ruang Terbuka Hijau (RTH)**

Ruang Terbuka Hijau (RTH) merupakan elemen penting dalam penataan kota yang berkelanjutan. Secara ekologis, RTH berperan sebagai paru-paru kota yang menghasilkan oksigen dan menyerap karbon dioksida, sekaligus menyaring polutan udara. Vegetasi yang tumbuh di RTH membantu mereduksi kebisingan, menjaga kelembapan udara, serta menjadi habitat berbagai flora dan fauna perkotaan. Selain itu, RTH berkontribusi dalam pengaturan tata air kota dengan menyerap air hujan dan mencegah terjadinya banjir.

Dari sisi sosial, RTH menyediakan ruang interaksi bagi masyarakat, mendukung kesehatan mental dan fisik, serta menciptakan rasa memiliki terhadap lingkungan. Penelitian terdahulu (Jabbar, 2022; Berawi dkk., 2024) menegaskan bahwa RTH tidak hanya memiliki dimensi ekologis, tetapi juga dimensi ekonomi karena mampu meningkatkan nilai properti di sekitarnya dan menciptakan peluang usaha.

### **2.2 Teori Jejaring Kebijakan (Policy Network)**

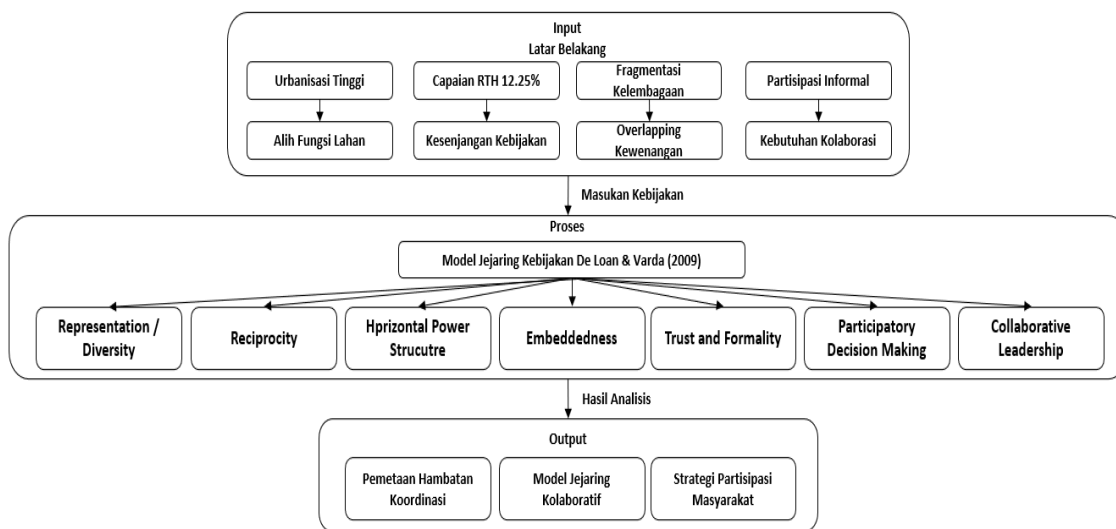
Teori jejaring kebijakan (policy network theory) merepresentasikan pola interaksi antar aktor yang saling bergantung dalam proses kebijakan. Rhodes (1997) dan Börzel (1998) menyatakan bahwa dalam jejaring kebijakan, tidak ada satu aktor pun yang sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan kebijakan secara mandiri, sehingga saling ketergantungan antar aktor mendorong terbentuknya relasi kerja sama.

DeLeon dan Varda (2009) mengembangkan kerangka operasional jejaring kebijakan yang mencakup tujuh dimensi utama: (1) Representation/Diversity – keterwakilan dan keberagaman aktor; (2) Reciprocity – hubungan timbal balik antar aktor; (3) Horizontal Power Structure – struktur kekuasaan yang setara; (4) Embeddedness – internalisasi nilai dan norma dalam interaksi; (5) Trust – kepercayaan antar aktor; (6) Participation in Decision Making – keterlibatan dalam pengambilan keputusan; dan (7) Collaborative Leadership – kepemimpinan yang kolaboratif.

Dalam perspektif governance network (Klijn & Koppenjan, 2016), efektivitas jejaring kebijakan sangat bergantung pada kualitas interaksi, distribusi kekuasaan yang relatif seimbang, serta tingkat kepercayaan yang terbangun di antara aktor-aktor yang terlibat. Ansell dan Gash (2008) menambahkan bahwa collaborative governance mensyaratkan adanya dialog yang setara, kepercayaan awal (starting conditions), serta komitmen bersama antar aktor.

### 2.3 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir penelitian ini menempatkan kondisi pengelolaan RTH Kota Bandung yang belum optimal sebagai titik tolak. Fragmentasi kebijakan antar instansi dan lemahnya koordinasi lintas sektor dianalisis melalui tujuh dimensi jejaring kebijakan DeLeon dan Varda (2009). Analisis ini menghasilkan identifikasi model jejaring kebijakan yang terbentuk, pola hubungan antar aktor, serta hambatan-hambatan dalam implementasi. Hasil akhirnya berupa rekomendasi penguatan jejaring kebijakan menuju tata kelola RTH yang efektif dan berkelanjutan.



[Gambar 1. Kerangka Berpikir: Pengelolaan RTH Kota Bandung melalui Pendekatan Jejaring Kebijakan DeLeon dan Varda (2009)]

Peneliti (2026)

### 2.4 Penelitian Terdahulu

Mariane (2023) dalam penelitiannya tentang jejaring kebijakan CSR menunjukkan bahwa efektivitas jejaring sangat bergantung pada kejelasan peran antar aktor dan mekanisme koordinasi yang terstruktur. Widayat dkk. (2023) melalui analisis jejaring sosial program urban farming Kota Bandung menemukan bahwa keterlibatan multipihak meningkatkan efektivitas

implementasi program. Pratama dan Roziqin (2021) melalui kajian pustaka sistematis tentang tata kelola RTH menegaskan pentingnya pendekatan multi-aktor dalam pengelolaan RTH perkotaan, seiring dengan kompleksitas kepentingan yang harus diakomodasi. Riandi (2024) meneliti efektivitas kebijakan RTH di Kota Bandung dan menemukan bahwa keterbatasan partisipasi masyarakat menjadi salah satu hambatan utama dalam pencapaian target luasan RTH.

### **3. METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Pendekatan dan Desain Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode fenomenologi. Pendekatan ini dipilih karena bertujuan untuk memahami pengalaman dan makna yang diberikan oleh para aktor terhadap fenomena jejaring kebijakan dalam pengelolaan RTH di Kota Bandung. Metode fenomenologi memungkinkan peneliti menggali secara mendalam perspektif subjektif para informan berdasarkan pengalaman langsung mereka dalam berinteraksi di dalam jejaring kebijakan.

#### **3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian dilaksanakan di Kota Bandung, Jawa Barat, dengan melibatkan berbagai instansi dan aktor yang terlibat dalam pengelolaan RTH. Pengumpulan data berlangsung pada periode Januari hingga April 2026, dilanjutkan dengan analisis data dan penyusunan laporan penelitian.

#### **3.3 Teknik Pengumpulan Data**

Data dikumpulkan melalui empat teknik utama: (1) Wawancara mendalam (in-depth interview) dengan para informan kunci yang dipilih secara purposif; (2) Observasi langsung terhadap kondisi RTH dan kegiatan pengelolaan di lapangan; (3) Studi dokumentasi terhadap regulasi, laporan, dan dokumen kebijakan terkait RTH; serta (4) Focus Group Discussion (FGD) yang melibatkan representasi dari berbagai kelompok aktor.

#### **3.4 Informan Penelitian**

Informan dipilih secara purposif berdasarkan keterlibatan dan pengetahuan mereka dalam jejaring kebijakan RTH. Informan terdiri dari: Kepala Bidang Pertanahan & PSU DPKP3 Kota Bandung; Kepala Bidang Tata Lingkungan DLHK Kota Bandung; Kepala Bidang Tata Ruang DICIPTABINTAR Kota Bandung; Dosen Kebijakan Publik Universitas

Pasundan; Ketua Divisi Kampanye & Advokasi WALHI Jawa Barat; Pegiat Lingkungan Masagi Tjibogo Kota Bandung; dan Owner Cafe Hutanika (pelaku usaha berbasis RTH).

### **3.5 Teknik Analisis Data**

Analisis data dilakukan secara tematik mengacu pada model analisis Creswell (2014), yang mencakup: (1) pengorganisasian dan persiapan data; (2) pembacaan dan pencatatan gagasan umum; (3) pengkodean data; (4) pengelompokan tema; (5) interpretasi makna tema; dan (6) penyajian narasi kualitatif. Pemeriksaan keabsahan data dilakukan melalui triangulasi sumber, triangulasi teknik, member checking, dan peer debriefing.

### **3.6 Operasional Parameter**

Parameter penelitian dioperasionalkan berdasarkan tujuh dimensi jejaring kebijakan DeLeon dan Varda (2009): representation/diversity diukur dari keberagaman aktor yang terlibat; reciprocity dari mekanisme timbal balik yang ada; horizontal power structure dari kesetaraan akses dan pengaruh; embeddedness dari internalisasi nilai bersama; trust dari tingkat kepercayaan antar aktor; participation in decision making dari kualitas dan jangkauan partisipasi; serta collaborative leadership dari kapasitas kepemimpinan dalam mengelola keberagaman kepentingan.

## **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **4.1 Representation/Diversity: Keberagaman Aktor dalam Jejaring**

Jejaring kebijakan RTH di Kota Bandung melibatkan aktor yang beragam, mencakup tiga instansi pemerintah utama (DPKP3, DLHK, DICIPTABINTAR), akademisi, LSM (WALHI Jawa Barat), komunitas (Masagi Tjibogo), dan pelaku usaha. Keterlibatan multi-aktor ini mengindikasikan adanya keberagaman latar belakang, keahlian, dan kepentingan. Namun, realisasi sinergi antar aktor masih terkendala oleh fragmentasi kebijakan yang menghambat integrasi keahlian dan pemanfaatan sumber daya secara menyeluruh. Forum koordinasi yang seharusnya menjadi ruang menyatukan visi dan strategi antarsektor masih sangat terbatas.

### **4.2 Reciprocity: Timbal Balik dan Ketidakseimbangan Relasi**

Meskipun terdapat indikasi kemitraan potensial antara komunitas dan sektor swasta dalam pengembangan taman, belum ditemukan mekanisme imbal balik yang bersifat formal dan terstruktur. Hubungan antarsektor lebih banyak bersifat inisiatif dan informal tanpa kejelasan mengenai distribusi manfaat atau kewajiban. Pemerintah masih memegang peran

dominan, sementara masyarakat lebih sering ditempatkan sebagai pelaksana atau penjaga pemeliharaan, bukan sebagai mitra strategis dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan.

#### **4.3 Horizontal Power Structure: Ketimpangan Relasi Kekuasaan**

Akses masyarakat terhadap informasi dan keterlibatan dalam proses perencanaan kebijakan masih terbatas, diperburuk oleh minimnya keterbukaan data dari instansi pemerintah. Fragmentasi antar instansi menunjukkan kurangnya keterbukaan dalam pengambilan keputusan bersama. Ketimpangan juga terlihat dalam kapasitas negosiasi antar aktor, di mana pemerintah memiliki posisi dominan sementara masyarakat sipil dan komunitas belum memiliki kekuatan tawar yang memadai.

#### **4.4 Embeddedness: Internalisasi Nilai dan Norma Bersama**

Pemikiran kolektif, persepsi bersama, dan pengetahuan yang terbentuk melalui interaksi antar aktor belum berkembang secara kuat. Interaksi lintas sektor belum membentuk landasan pemahaman bersama yang kokoh, sehingga koordinasi kebijakan cenderung berjalan secara sektoral. Pengaruh politik yang besar turut memperlemah efektivitas koordinasi melalui tumpang tindih kewenangan antar lembaga.

#### **4.5 Trust and Formality: Kepercayaan dan Formalitas**

Tingkat kepercayaan antar aktor masih rendah dan bersifat diferensial berdasarkan jenis aktor dan intensitas interaksi. Kepercayaan yang ada cenderung berbasis pengalaman (*experience-based trust*), bukan kepercayaan yang sepenuhnya terlembagakan. Kepercayaan di tingkat komunitas bersifat lebih kuat dan organik, namun belum meluas ke aktor formal. Terdapat kesenjangan kepercayaan (*trust gap*) antara aktor komunitas dengan aktor formal pemerintah dan swasta. Kepercayaan dan formalitas bersifat komplementer: kepercayaan sebagai fondasi relasional, sementara formalitas sebagai mekanisme pengikat konsistensi dan akuntabilitas.

#### **4.6 Participation in Decision Making: Antara Formalitas Prosedural dan Deliberasi Substantif**

Proses pengambilan keputusan terkait RTH telah difasilitasi melalui mekanisme formal seperti musrenbang, konsultasi publik melalui AMDAL dan KLHS, public hearing, serta penyusunan RDTR. Namun, partisipasi yang terjadi masih bersifat konsultatif dan prosedural

– model consultative participation. Aktor non-pemerintah lebih berperan sebagai pemberi masukan daripada memiliki posisi setara dalam menentukan keputusan akhir. Perspektif dari WALHI Jawa Barat dan komunitas Masagi Tjibogo menegaskan bahwa partisipasi masih berada pada spektrum tokenistic participation, di mana kepentingan ekonomi kerap lebih dominan dibandingkan kepentingan ekologis dan sosial.

#### **4.7 Collaborative Leadership: Kepemimpinan Kolaboratif**

Pimpinan pada level teknis pemerintah berupaya menyeimbangkan kepentingan pembangunan dan lingkungan melalui pendekatan regulatif dan teknokratis berbasis data. Fungsi koordinatif dan mediatif telah dijalankan melalui forum lintas sektor. Namun, netralitas pimpinan kerap diuji oleh tekanan kepentingan yang beragam. Dari perspektif komunitas, koordinasi masih terasa top-down dan belum sepenuhnya mengakomodasi kepentingan aktor akar rumput.

#### **4.8 Model Jejaring Kebijakan RTH Kota Bandung**

Model jejaring kebijakan yang terbentuk antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam kebijakan RTH di Kota Bandung dapat dipahami sebagai policy network yang bersifat semi-hierarkis dan berada dalam fase transisional. Pemerintah daerah menempati posisi sentral sebagai aktor utama yang mengendalikan arah kebijakan, sementara aktor non-pemerintah seperti masyarakat, komunitas, dan sebagian LSM cenderung berperan sebagai pendukung atau pemberi masukan.

Dari perspektif governance network (Klijn & Koppenjan, 2016), jejaring kebijakan RTH di Kota Bandung menunjukkan karakter interaksi yang belum sepenuhnya horizontal. Walaupun telah terjadi koordinasi dan interaksi antar aktor, relasi yang terbentuk masih cenderung semi-hierarkis karena dominasi aktor pemerintah. Jejaring ini dapat dikategorikan sebagai developing policy network, di mana interaksi antar aktor sudah terbangun, namun masih memerlukan penguatan dalam hal pemerataan akses dan penataan ulang pola relasi.



[Gambar 2. Jejaring Kebijakan Ruang Terbuka Hijau di Kota Bandung  
Sumber : Peneliti 2026]

Bentuk Jejaring Kebijakan dalam kebijakan RTH di Kota Bandung dapat dikategorikan ke dalam tiga level: formal (konsultasi publik, public hearing, musrenbang, AMDAL, KLHS, RDTR), semi-formal (koordinasi antar dinas, kemitraan berbasis CSR, kerja sama dengan komunitas), dan informal (berbasis nilai gotong royong dan kepercayaan sosial di tingkat akar rumput). Secara keseluruhan, model ini menempatkan pemerintah sebagai core actor, sektor swasta sebagai provider dan innovator yang masih sangat bergantung pada regulasi pemerintah, akademisi dan LSM sebagai knowledge provider dan advocacy actor, serta masyarakat dan komunitas sebagai aktor partisipatif di level implementasi.

#### **4.9 Hambatan dalam Implementasi Kebijakan RTH**

Penelitian mengidentifikasi tujuh dimensi hambatan yang membentuk ekosistem interlocking constraints dalam implementasi kebijakan RTH: (1) Ketimpangan relasi kekuasaan – dominasi pemerintah mengurangi ruang deliberasi yang setara; (2) Rendahnya kepercayaan antar aktor; (3) Rendahnya inklusivitas partisipasi; (4) Ketimpangan distribusi manfaat; (5) Keterbatasan kapasitas dan akses informasi; (6) Lemahnya kelembagaan jejaring kebijakan; dan (7) Tekanan pembangunan dan konflik kepentingan antara orientasi ekonomi dan ekologis. Ketujuh dimensi ini saling mengunci dan memperkuat satu sama lain, menunjukkan bahwa kegagalan jejaring kebijakan RTH merupakan persoalan sistemik, bukan sekadar teknis.

## **5. SIMPULAN DAN SARAN**

### **5.1 Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan bahwa pengelolaan RTH di Kota Bandung menunjukkan terbentuknya jejaring kebijakan yang melibatkan berbagai aktor lintas sektor dengan hubungan saling bergantung. Namun, struktur dan dinamika jejaring yang terbentuk belum berjalan secara seimbang. Relasi kekuasaan masih menunjukkan dominasi pemerintah dalam pengambilan keputusan, sementara aktor non-pemerintah cenderung berada pada posisi yang lebih lemah dengan keterlibatan yang bersifat konsultatif.

Jejaring kebijakan RTH di Kota Bandung bersifat semi-hierarkis dan berada dalam fase transisional. Mekanisme interaksi masih banyak bergantung pada koordinasi informal dan hubungan berbasis kepercayaan, sementara dukungan kelembagaan formal belum sepenuhnya mampu mengatur hubungan timbal balik secara sistematis. Penguatan jejaring kebijakan melalui peningkatan kesetaraan relasi antar aktor, penguatan mekanisme kelembagaan, serta

optimalisasi integrasi peran menjadi agenda mendesak untuk mendorong efektivitas pengelolaan RTH yang berkelanjutan.

## 5.2 Saran

Berdasarkan temuan penelitian, disampaikan beberapa saran berikut:

**Rekomendasi Kebijakan:** Pemerintah Kota Bandung perlu mengembangkan platform koordinasi lintas sektor yang lebih terstruktur dan berkelanjutan untuk menggantikan forum ad hoc yang bersifat sementara. Diperlukan regulasi yang secara spesifik mengatur hubungan timbal balik antar aktor, termasuk pembagian peran, insentif, dan mekanisme evaluasi bersama.

**Saran Praktis:** Pemerintah daerah perlu meningkatkan kualitas partisipasi masyarakat dengan menggeser pendekatan dari sekadar konsultatif menuju partisipasi yang lebih substantif. Peningkatan kapasitas aktor non-pemerintah dan transparansi informasi kebijakan RTH juga menjadi prioritas untuk mengurangi kesenjangan informasi dan meningkatkan kepercayaan dalam jejaring.

**Saran Teoritis:** Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan kajian lebih mendalam mengenai hubungan antara struktur kekuasaan dan efektivitas jejaring kebijakan dalam konteks perkotaan di negara berkembang, serta mengkaji dimensi pengetahuan berbasis komunitas (local knowledge) dalam kerangka jejaring kebijakan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Börzel, T. A. (1998). Organizing Babylon: On the different conceptions of policy networks. *Public Administration*, 76(2), 253–273.
- Berawi, M. A., Siahaan, L., & dkk. (2024). Urban green space and social cohesion: A review of recent literature. *Urban Studies Journal*, 45(3), 112–130.
- DeLeon, P., & Varda, D. M. (2009). Toward a theory of collaborative policy networks: Identifying structural tendencies. *Policy Studies Journal*, 37(1), 59–74. <https://doi.org/10.1111/j.1541-0072.2008.00295.x>
- Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2012). An integrative framework for collaborative governance. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 22(1), 1–29.
- Ernawati, E., Johari, H., & Hadi, A. (2021). Studi pemanfaatan ruang terbuka hijau (RTH) Udayana Kota Mataram. Prosiding Seminar. <https://journal.ummat.ac.id/index.php/PRPE/article/view/3996>

- Fauzan, F., & Syaodih, E. (2021). Kajian implementasi smart environment di Kota Bandung. *Jurnal Riset Perencanaan Wilayah dan Kota*. <https://journals.unisba.ac.id/index.php/JRPWK/article/view/481>
- Jabbar, M. (2022). Assessing the role of urban green spaces for human well-being: A systematic review. *GeoJournal*, 87(5), 4405–4423. <https://doi.org/10.1007/s10708-021-10474-7>
- Karmila, T., Subagja, I., Hakim, A., & dkk. (2024). Pengaruh implementasi kebijakan terkait tata kelola dan infrastruktur di pusat data. *Mutiara*. <https://mutiara.almakkipublisher.com/index.php/al/article/view/190>
- Klijn, E. H., & Koppenjan, J. (2016). *Governance networks in the public sector*. Routledge.
- Mariane, I. (2023). The policy network for effectiveness in corporate social responsibility. *JPPi (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)*, 9(1), 218. <https://doi.org/10.29210/020221907>
- Muchtar, H., Wijaya, I., & dkk. (2024). Pembangunan berkelanjutan perkotaan dalam aspek ekologi Kota Bandung. *Planning for Urban Region and Environment*. <https://purejournal.ub.ac.id/index.php/pure/article/view/722>
- Nugroho, A., & Hidayati, R. (2023). Identifikasi kesesuaian vegetasi taman sebagai ruang terbuka hijau kota. *Prosiding SIAR*. <https://proceedings.ums.ac.id/index.php/siar/article/view/3023>
- Pradityo, M., Yuningsih, N., & dkk. (2021). Efektivitas program taman tematik sebagai upaya pengembangan ruang terbuka hijau Kota Bandung pada tahun 2019. *Jurnal Administrasi Publik*. <https://jurnal.unpad.ac.id/janitra/article/view/33026>
- Pratama, I., & Roziqin, A. (2021). Tata kelola ruang terbuka hijau: Sebuah kajian pustaka terstruktur (systematic literature review). *Jurnal Komunikasi Pembangunan*. <https://journal.ipb.ac.id/index.php/jurnalkmp/article/view/36310>
- Pratama, I. A., Izharyah, J., & dkk. (2022). Analisis perencanaan pembangunan program ruang terbuka hijau (RTH) di Kota Medan. *Jurnal Administrasi Publik*. <http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/JAPK/article/view/10633>
- RACHMANI, R. (2023). Lahan potensial penambahan ruang terbuka hijau publik tingkat kecamatan di Kota Bandung. *Prosiding FTSP Series*. <https://e proceeding.itenas.ac.id/index.php/ftsp/article/view/2737>
- Rhodes, R. A. W. (1997). *Understanding governance: Policy networks, governance, reflexivity and accountability*. Open University Press.
- Riandi, A. (2024). Efektivitas kebijakan ruang terbuka hijau (RTH) pada proporsi luas wilayah Kota Bandung tahun 2022. *Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati*. <https://digilib.uinsgd.ac.id/98002/>
- Rohima, A. (2022). Faktor penghambat pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) di Kota Jambi. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law*. <https://scholar.archive.org/work/uvvrydoxtnh4vhzaqrtr24bqru>
- Syaodih, E. (2024). Strategi pengelolaan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan Sumedang. *Bandung Conference Series: Urban & Regional Planning*. <https://proceedings.unisba.ac.id/index.php/BCSURP/article/view/13238>

- Tisnasendjaja, A., & Monica, W. (2023). Pemetaan ruang terbuka hijau (RTH) di Kota Bandung dalam pemenuhan kebutuhan oksigen berdasarkan metode gerarkis. *Geoplanart*. <https://journal.unwim.ac.id/index.php/geoplanart/article/view/713>
- Viantara, R. (2020). Analisis taman tematik sebagai ruang terbuka publik di Kota Bandung. *Geoplanart*. <https://journal.unwim.ac.id/index.php/geoplanart/article/view/224>
- Widayat, Y. Y., Karlina, N., Munajat, M. D. E., & Ningrum, S. (2023). Mapping policy actors using social network analysis on integrated urban farming program in Bandung City. *Sustainability*, 15(12), 9612. <https://doi.org/10.3390/su15129612>